

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPARADIGMA
"PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT"
(PENANGGULANGAN DAMPAK BURUK PERTAMBANGAN DENGAN
PEMETAAN DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL)**

Fitri Ramdhani Harahap, Sujadmi

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di Desa Gunung Muda, Riding Panjang, dan Desa Lumut, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah-masalah mendasar yang dialami oleh masyarakat Bangka Belitung khususnya masyarakat di Desa Gunung Muda, Riding Panjang, dan Desa Lumut, Kecamatan Belinyu terkait kegiatan penambangan timah, merencanakan dan mengembangkan potensi modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Belinyu dan memetakan modal-modal sosial yang potensial untuk dijadikan sebagai modal untuk mengatasi dampak buruk pertambangan timah.

Kegiatan pemberdayaan dengan pendekatan *People Centered Development* sebagai sebuah model pembangunan partisipatoris yang berpusat pada rakyat menggunakan metode pemetaan sosial dan pemetaan fisik. Pemetaan sosial dan pemetaan fisik fokus untuk memetakan permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak buruk pertambangan timah yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Belinyu. Dalam upaya memetakan permasalahan sosial lingkungan fisik, maka yang dilakukan adalah mengidentifikasi modal sosial potensial dan dampak buruk pertambangan timah, menemukan alternatif solusi penanganan dampak buruk pertambangan timah, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait penanganan dampak buruk pertambangan timah, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, serta membentuk dan menguatkan sistem kelembagaan sosial dalam penanganan dampak buruk pertambangan timah.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk program KKN-PPM 2015 ditemukan beberapa metode yang dituangkan dalam kegiatan yaitu (1) pemetaan sosial dan pemetaan fisik dalam upaya mengidentifikasi

modal sosial potensial dan dampak buruk pertambangan, (2) diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan sosialisasi untuk menemukan alternatif solusi penanganan dampak buruk pertambangan timah, (3) penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, (4) penyuluhan, pelatihan dan kunjungan lapangan (*site visit*) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, dan (5) pendampingan kelompok untuk membentuk dan menguatkan sistem kelembagaan sosial dalam penanganan dampak buruk pertambangan timah.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Modal Sosial, Pemetaan Sosial*

A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai cadangan timah yang cukup besar dan telah ditambang lebih dari 300 tahun. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt (Sabuk Timah Indonesia)*. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt (Sabuk Timah Asia Tenggara)* yang membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas

penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka dan Belitung merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.

Maraknya penambangan timah rakyat berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan warga masyarakat. Penambangan timah rakyat memberikan manfaat keuangan yang besar. Tidak seperti bertani lada yang hasilnya baru didapat setidaknya setelah dua tahun memelihara tanaman ini, pekerjaan menambang timah dapat menghasilkan uang yang setara dengan jangka waktu 1-3 bulan saja. Ribuan rumah di tepi jalan yang dulunya terbuat dari kayu atau anyaman bambu kini telah direnovasi para pemiliknya menjadi rumah-rumah layaknya di perkotaan dengan perangkat elektronik yang lengkap dan kendaraan pribadi. Akan tetapi, dampak negatif penambangan timah rakyat lebih besar dari dampak positifnya. Tidak adanya kebijakan tentang mekanisme penjualan hasil tambang timah rakyat, menyebabkan penambangan timah rakyat dapat menjual hasilnya ke mana saja dengan harga "miring", dan kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang mengizinkan mengeksport pasir timah secara langsung, telah menimbulkan pula kerugian yang semakin besar bagi PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin, juga terhadap pemasukan negara dan pemerintah daerah, karena ekspor produksi penambangan timah rakyat tidak membayar royalti, terjadinya penurunan harga logam timah di

pasaran internasional akibat stok logam timah sampai di atas normal yang sebagian besar berasal dari Indonesia.

Penambangan timah rakyat menyebabkan pencemaran laut. Akibatnya nelayan kehilangan mata pencahariannya karena mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di laut yang telah tercemar oleh *tailing*. Di desa Air Anyut, Kabupaten Bangka sendiri telah terjadi pencemaran dan kerusakan air sungai sehingga masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) mengeluhkan bahwa persediaan air mereka mulai tercemar. Pencemaran air juga terjadi di persawahan sehingga mempengaruhi menurunnya produksi padi di Kabupaten Bangka. Perkebunan kelapa sawit mengeluhkan hal yang sama karena perkebunan mereka penuh dengan lobang-lobang kecil bekas galian tambang timah. Hutan di Bangka Belitung semakin berkurang karena dirambah setelah lahan perkebunan lada semakin berkurang digantikan dengan tambang timah.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengalami perubahan dengan diterapkannya otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi daerah otonom untuk memperbaiki fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sebab otonomi yang mentransfer berbagai kewenangan akan melahirkan diskresi di tingkat lokal dalam membuat kebijakan pembangunan daerah yang sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun, peluang tersebut

tidak serta merta dapat merubah pola pembangunan daerah menjadi semakin baik untuk masyarakat daerah. Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat adalah faktor operasional yang cukup signifikan membuat peluang tersebut terealisasi secara empirik.

Dalam kerangka itu, belakangan ini muncul berbagai model pembangunan alternatif diantaranya adalah pengembangan komunitas lokal; pembangunan partisipatoris berpusat pada rakyat; pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan HAM; dan pembangunan perspektif perdamaian. Secara substansial berbagai mode pembangunan alternatif yang ada meskipun memiliki variasi tekanan masing-masing pada dasarnya memiliki kesamaan umum. Menurut Bjorn Hettne kesamaan umum itu yaitu berorientasi pada kebutuhan pokok, bersifat dari dalam/lokal, bernuansa menghargai lingkungan dan berdasar pada transformasi struktural. Misalnya model pembangunan partisipatoris berpusat pada rakyat atau yang lebih populer dengan istilah "*People Centered Development*". Model atau paradigma ini merupakan salah satu alternatif bagi paradigma pembangunan daerah di era otonomi. Konsep modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia karena dalam model ini, manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia.

B. Metode Pelaksanaan

1. Persiapan Program KKN-PPM

Persiapan program KKN-PPM sangat penting untuk dilakukan dalam rangka merumuskan konsep dalam bentuk usulan kegiatan atau proposal yang disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penyusunan proposal KKN-PPM. Setelah konsep dipersiapkan, maka tahapan kegiatan persiapan yang dilakukan selanjutnya adalah *survei dan observasi awal* dengan mengumpulkan data/informasi sekunder dan berkunjung langsung ke lokasi penelitian.

Setelah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyelesaikan usulan kegiatan atau proposal KKN disusun ulang kembali. Proposal yang telah selesai dijadikan pedoman untuk *audiensi dan koordinasi* dengan pihak-pihak yang akan terlibat terutama Camat dan Kepala Desa, serta mitra yang akan terlibat dan membantu pelaksanaan program KKN-PPM. Audiensi dan koordinasi ini dilakukan oleh DPL bersama-sama dengan mahasiswa peserta KKN.

Setelah audiensi dan koordinasi dilakukan, tahapan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan KKN X Universitas Bangka Belitung adalah melakukan pengumuman dan rekrutmen mahasiswa yang akan menjadi peserta KKN-PPM. Rekrutmen mahasiswa dimulai dengan mengumumkan rekrutmen peserta KKN-PPM dengan syarat dan ketentuan. Mempersiapkan mahasiswa yang akan terlibat dalam program KKN-PPM merupakan tahapan penting untuk memilih mahasiswa yang memiliki kapasitas sesuai tema program KKN-PPM. Pemilihan mahasiswa dilakukan lewat proses seleksi yaitu wawancara dan

evaluasi makalah terkait judul program KKN-PPM. Mahasiswa yang akan terlibat dalam program KKN-PPM merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti Sosiologi, Hukum, Teknik Pertambangan, Teknik Sipil Ekonomi Manajemen, dan Teknik Elektro.

Kegiatan pembekalan terhadap mahasiswa yang akan terlibat dalam program KKN-PPM dilakukan dengan metode memberikan muatan pengetahuan atas masalah dan metode penyelesaian masalah terkait tema yang diangkat dengan berdiskusi dan tanya jawab. Pembekalan dilakukan oleh dosen dengan memberikan materi-materi antara lain; (1) dampak buruk pertambangan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) teknik pemetaan sosial dan pemetaan fisik, (4) modal sosial, dan (5) teknik penyusunan program, evaluasi, serta pelaporan.

2. Pelaksanaan Program KKN-PPM

Proses pelaksanaan program KKN-PPM dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan utama yaitu metode pemetaan sosial, pemetaan fisik, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), sosialisasi hasil diskusi kelompok terarah, penyuluhan, pelatihan, kunjungan lapangan (*site visit*), dan pendampingan kelompok. Selain kegiatan utama, kegiatan tambahan yang dilakukan antara lain mengikuti kegiatan sosial masyarakat seperti pengajian, shalat berjamaah di mesjid, menjadi panitia 17 Agustus, mengajar siswa SD, gotong royong, olah raga bersama masyarakat, dan lain-lain.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program KKN-PPM

Evaluasi program KKN-PPM dilakukan oleh tim internal (Monitoring dan evaluasi internal) dari LPPM Universitas Bangka Belitung serta evaluasi eksternal dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi (Monitoring dan evaluasi eksternal). Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan, Evatermasuk penyusunan laporan, dan penilaiannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

4. Rencana Keberlanjutan Program KKN-PPM

Usaha-usaha tindak lanjut dalam bentuk pembinaan dan pemeliharaan terhadap semua hasil kegiatan KKN yang telah dicapai perlu dilakukan di daerah yang pernah menjadi lokasi KKN dengan menjadikan lokasi KKN-PPM ini sebagai desa atau wilayah binaan dengan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu, masyarakat setempat diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan program yang telah dirintis dan dibina bersama mahasiswa KKN. Pembinaan tersebut dapat ditinjau dan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Setiap pelaksanaan kegiatan KKN selalu mengupayakan adanya jalinan kerjasama yang sinergis dengan instansi dan pihak terkait, agar dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi

yang dimiliki. Kerjasama ini dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan atau operasional sampai tindak lanjut. Pembinaan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan pengembangan hasil evaluasi dampak kegiatan KKN dan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan periodik dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan KKN. Selanjutnya rapat evaluasi kegiatan KKN dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan KKN. Dalam rapat evaluasi tersebut dibahas mengenai usaha-usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan KKN untuk periode berikutnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Identifikasi Modal Sosial Potensial dan Dampak Buruk Pertambangan Timah

Dalam pemetaan sosial, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (1) mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti struktur desa, arsip-arsip desa, dokumentasi dan lain-lain yang diambil dari kantor desa tempat kegiatan dilakukan, (2) mengumpulkan data primer dengan cara wawancara dilakukan kepada aparat desa agar mendapatkan informasi yang akurat serta dapat mengetahui informasi yang diperlukan yang terjadi di wilayah setempat dan juga wawancara atau pendekatan langsung kepada masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang telah dirasakan oleh masyarakat. Dan pengamatan (observasi) terhadap kondisi-kondisi lingkungan sosial, hubungan sosial, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, dan lain-lain.

Identifikasi terhadap tiga bentuk modal sosial potensial yaitu solidaritas pada tingkat tertinggi,

kepercayaan pada tingkat kedua dan gotong royong pada tingkat ketiga, sehingga berdasarkan hasil pemetaan sosial menunjukkan bahwa solidaritas, kepercayaan dan gotong royong sangat mungkin untuk digunakan untuk mengembangkan dan membangun kembali norma kehidupan bersama yang sangat kuat mengindikasikan pengaruhnya yang sangat besar terhadap keberhasilan berbagai upaya penanganan dampak buruk pertambangan timah.

Akibat yang nyata dari kegiatan penambangan timah adalah terjadinya lubang bekas penambangan timah yang menurut istilah di wilayah Bangka Belitung adalah *kolong*. Kolong pasca penambangan timah telah terjadi sejak penambangan timah dimulai, yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Bangka Belitung. Penambangan dengan sistem tambang terbuka (tambang semprot) menyebabkan terjadinya lubang-lubang yang pada umumnya terisi air sebagaimana layaknya reservoir alam. Sumber air tersebut berasal dari air tanah, sungai, dan air hujan.

Pada dasarnya, kolong mempunyai potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Pemanfaatan kolong yang lebih efisien diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan berfungsinya kolong secara optimal, permasalahan setempat yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah akan dapat dipecahkan dengan baik. Pemanfaatan kolong saat ini belum dilakukan secara optimal mengingat hanya beberapa kolong yang sudah dimanfaatkan terutama untuk irigasi/persawahan, perendaman lada putih,

keramba/tambak ikan, sumber air PDAM, dan keperluan PLN. Pemberdayaan kolong paska penambangan timah akan optimal jika aspek fisik kolong dan aspek sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kolong dapat diidentifikasi dengan baik.

2. Alternatif Solusi Penanganan Dampak Buruk Pertambangan Timah

Sebuah upaya yang diambil untuk menangani dampak buruk pertambangan timah dilakukan dalam bentuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa secara langsung. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menggali alternatif-alternatif yang tepat untuk bisa digunakan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan pada kegiatan pengembangan yang berkelanjutan ke depannya.

Metode ini merupakan cara yang cepat untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya mengenai kondisi geografis dan sosial-ekonomi. Disikusi kelompok dapat melibatkan anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latarbelakang, dalam hal ini yang memahami persoalan pertambangan timah terutama dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Sosialisasi diharapkan menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat (sebagai subjek pelaksana program) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama yang berpijak pada

kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Penanganan Dampak Buruk Pertambangan Timah

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan, penerangan, pendidikan, penegakan hukum disertai pemberian rangsangan atau motivasi atas peran aktif masyarakat menjaga lingkungan hidup, dalam hal ini terkait kepedulian terhadap dampak buruk pertambangan timah di lingkungannya.

Penekanan konsep penyuluhan lebih pada upaya mengubah perilaku sasaran agar berperilaku terutama pada aspek kognitif (pengetahuan dan pemahaman sasaran), sehingga pengetahuan sasaran penyuluhan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluh maka penyuluhan berikutnya akan dijalankan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Maka terkait penanganan dampak buruk pertambangan perlu dilakukan penyesuaian materi penyuluhan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain kegiatan penyuluhan, kegiatan pelatihan juga dianggap perlu karena pelatihan lingkungan kepada masyarakat akan menghasilkan masyarakat yang sadar akan betapa pentingnya keadaan lingkungan yang seimbang untuk kehidupan yang sempurna. Namun pendidikan lingkungan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan proses untuk menciptakan sumber daya manusia yang peduli akan lingkungan. Atas dasar itulah Pendidikan lingkungan harus

diberikan sedini mungkin, agar dapat mengurangi kerusakan lingkungan.

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Dampak Buruk Pertambangan Timah

Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan desa dalam penanganan dampak buruk pertambangan timah juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Uraian mengenai metode yang digunakan akan menjelaskan kegiatan kunjungan ke lokasi perkebunan, dimana kelompok binaan dapat belajar secara langsung dengan pengalaman terlibat untuk menumbuhkan semangat dan motivasi untuk memulai kegiatan yang telah dirintis dalam kegiatan sebelumnya.

Kegiatan kunjungan ini dilakukan pada hari kamis tanggal 3 september 2015 dilakukan dari pagi sampai sore hari. Lokasi ataupun objek dari kegiatan kunjungan ini yaitu kebun Haji Eng di Jada Bahrin. Kegiatan Kunjungan lapangan ini melibatkan masyarakat yang berjumlah 5 orang masyarakat desa Gunung Muda untuk mengajak mereka melihat kebun Haji Eng yang terkenal dengan tanaman-tanaman yang unik dan telah berhasil menciptakan teknik penanaman bibit yang unggul sehingga menjadi pengusaha yang sukses. Adapun tujuan dari kegiatan kunjungan lapangan ini diharapkan masyarakat dapat mengambil ilmu ataupun pengalaman dari bapak Haji Eng di bidang pertanian sehingga dapat menerapkannya serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat lain untuk kemajuan desa Gunung

Muda sebagai alternative paska tambang.

D. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat di Desa Gunung Muda, Riding Panjang, dan Desa Lumut, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah-masalah mendasar yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat kegiatan pertambangan timah, merencanakan dan mengembangkan potensi modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Belinyu dan memetakan modal-modal sosial yang potensial untuk dijadikan sebagai modal untuk mengatasi dampak buruk pertambangan timah. Target khusus yang diharapkan adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, mengembangkan dan memanfaatkan modal-modal sosial potensial yang dimiliki, semakin berdayanya lembaga-lembaga sosial yang dimiliki masyarakat, dan meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pertambangan timah, dan untuk menentukan kebijakan pemanfaatan modal sosial dalam penanganan dampak buruk pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Modal sosial potensial yang berhasil diidentifikasi dibedakan ke dalam tiga tingkatan yaitu modal sosial solidaritas pada tingkatan pertama, kepercayaan pada tingkatan kedua dan gotong royong pada

tingkatan ketiga. Adapun perbedaan tingkatan ini didapatkan dari intensitas aktifitas sosial yang selama ini dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat yang di dalamnya terkandung modal-modal sosial tersebut. Modal-modal sosial potensial ini kemudian digunakan untuk mengembangkan dan membangun kembali norma kehidupan bersama yang sangat kuat mengindikasikan pengaruhnya yang sangat besar terhadap keberhasilan berbagai upaya penanganan dampak buruk pertambangan timah yang akan dilakukan berikutnya. Modal sosial bila dikelola dengan baik dan benar akan lebih mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan (pranata) sosial ekonomi baik itu yang bersifat formal maupun informal mutlak dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan modal sosial dalam pembangunan. Untuk hal itu perlu dilakukan upaya selalu memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan.

Dampak buruk pertambangan yang berhasil diidentifikasi dengan mengamati aspek fisik ditemukan dimensi (jumlah dan luas kolong), usia, kondisi ikutan, kualitas air kolong (warna, rasa dan bau), status pemanfaatan kolong dan potensi pemanfaatan kolong yang cukup beragam. Namun secara umum ditemukan bahwa sebagian besar kolong dimanfaatkan untuk cuci dan mandi terutama pada saat musim kemarau, sementara potensi pemanfaatannya dapat dikembangkan untuk perikanan, pertanian dan pariwisata dengan penanganan lebih lanjut.

Alternatif solusi penanganan dampak buruk pertambangan timah yang telah dilakukan yaitu

menggerakkan ekonomi kreatif usaha kemplang yang sudah dimiliki oleh masyarakat khususnya di Desa Lumut, pemanfaatan lahan bekas penambangan untuk perikanan, pertanian dan pariwisata kolong di Desa Lumut, Riding Panjang dan Desa Gunung Muda, budidaya Toga di pekarangan rumah, serta pembentukan Perdes (Peraturan Desa) terkait pertambangan yang sudah digagas di Desa Gunung Muda.

Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan peran serta masyarakat juga pemerintah terkait penanganan dampak buruk pertambangan timah telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan penyadaran lingkungan bekerjasama dengan Walhi Bangka Belitung dan melakukan kunjungan ke salah satu perkebunan yaitu perkebunan Haji Eng di Desa Jade Bahrain yang telah berhasil melakukan pengembangan sistem pertanian. Kegiatan kunjungan ke perkebunan ini diharapkan dapat memotivasi kelompok masyarakat untuk melakukan pengembangan pertanian di Desa masing-masing yang memanfaatkan lahan bekas pertambangan.

Pembentukan dan penguatan sistem kelembagaan sosial dalam penanganan dampak buruk pertambangan timah dilakukan dengan menindaklanjuti hasil kegiatan penyuluhan dengan membentuk kelompok masyarakat yang berminat pada kegiatan kelompok pengusaha kemplang, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha pertanian dan perkebunan. Kelompok-kelompok ini diharapkan dapat terbentuk secara formal maupun informal sebagai sebuah organisasi dan kemudian terlembaga sehingga dapat dilihat sejauh mana perkembangannya.

Meskipun dalam pembentukannya tidaklah mudah untuk tetap mempertahankan keberadaan kelompok-kelompok ini karena banyaknya keterbatasan, namun di masa yang akan datang diharapkan dapat dilakukan keberlanjutan kegiatan yang berupaya menguatkan kelompok-kelompok ini.

E. Saran

Program Pemberdayaan yang baik seyogyanya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan, dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Program Pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat, dan mengembangkannya dengan dibantu oleh sistem, alat, atau teknologi baru dan peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat proses pemberdayaan sehingga bernilai tambah tinggi. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam upaya menindaklanjuti upaya-upaya penanganan dampak buruk pertambangan timah maka penguatan kelembagaan sosial baik yang formal maupun informal harus dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan modal sosial potensial yang telah diidentifikasi. Upaya

selanjutnya yang akan dilakukan adalah :

1. Perbaikan struktur dan fungsi kelembagaan sosial
2. Pemanfaatan informasi dan teknologi yang berimbang
3. Peningkatan program-program pendidikan dan pelatihan secara berkelompok
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana aktifitas kelembagaan
5. Memberdayakan dan memfasilitasi kelembagaan sosial informal
6. Menciptakan pemimpin kelembagaan yang transformasional

F. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih diucapkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan KKN melalui Hibah Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) tahun 2015, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Induk, Kecamatan Belinyu dan Desa Gunung Muda, Desa Riding Panjang dan Desa Lumut, serta mitra Walhi Bangka Belitung dan PT. Timah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, dkk. 2008. Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat. Tidak Dipublikasikan. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,*

- dan *Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.
- Leibo. J, 1996. *SU: Sosiologi Pedesaan. Mencari Suatu strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Sudibyo dan Sudayatna, 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Materi Pelatihan Pengelolaan Hutan Mangrove Secara Lestari*, diselenggarakan oleh Mangrove Information Centre Project, Kerjasama JICA dan Departemen Kehutanan di Bali, September 2002. Pusat Diklat Kehutanan. Bogor.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Todaro, M.P., 1978. *Economic Development in The Third World*. Longmen Inc. New York.